UNIT PELAKSANA TEKNIS-PERPUSTAKAAN UNIKOM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek

Apabila kita menyimak perkembangan penerimaan negara sejak Pelita I dapat disimpulkan, bahwa sumber utama penerimaan negara khususnya dari dalam negeri atau dari sektor minyak dan gas bumi. Sedangkan penerimaan dari sektor non migas (terutama pajak), peranannya masih sangat kecil. Namun memasuki Pelita IV, ketika harga minyak bumi tidak menentu karena resesi ekonomi melanda dunia, maka penerimaan negara dari sektor migas sudah tidak dapat diandalkan lagi sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Hal itu mendorong pemerintah untuk mencari sumber penerimaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, salah satunya adalah dari sektor pajak. Hal itu dimungkinkan, karena pajak menjadi sumber penerimaan negara yang paling utama.

Demi kelancaran pembangunan yang berjalan pada saat ini maka diperlukan dana yang cukup memadai. Dana ini harus bersumber dari kemampuan sendiri dan bantuan luar negeri. Karena itu kemampuan sendiri harus lebih besar dari kemampuan bantuan luar negeri, supaya bantuan luar negeri semakin kecil dan akhirnya diharapkan hanyasebagai pelengkap.Untuk itu pemerintah mengambil langkah baru, agar penerimaan negara meningkat setiap tahunnya.

Langkah itu adalah penyempurnaan system perpajakan, guna meningkatkan penerimaan pajak sebagai salah satu sektor penerimaan negara yang cukup

potensial, disamping sektor migas. Penyempurnaan system perpajakan ini ditandai dengan lahirnya Undang-undang perpajakan baru yang mempunyai self-assesment.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang perpajakan yang baru, dengan menggunakan system self-assesment masyarakat wajib pajak badan yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan pajak yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri. Selain daripada itu wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur dan berkesinambungan dengan jumlah pajak yang harus dibayar. Sebaliknya bagi administrasi perpajakan, sangat berperan aktif dalam pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi : pembinaan, penelitian, pengarahan dan penerapan sanksi pidana. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di masyarakat.

Akan tetapi dalam pelaksanaan system self-assesment perlu dilakukan pengawasan yang bertujuan membina dan mengarahkan wajib pajak, agar mau dan mampu memenuhi keawjibannya. Tinjauan ini dilakukan oleh aparatur pajak, maka dari segi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya aparatur pajak yang mungkin mampu dan bersih dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam Undang-undang perpajakan. Dari sini dapat diambil berbagai alasan oleh penulis, bahwa tinjauan ini sangat diperlukan dalam rangka

pelaksanaan kewajiban wajib pajak yang diberi kepercayaan penuh untuk melapor, menghitung dan menyetor pajaknya. Dalam hal ini penulis mengambil judul **Prosedur Pelaporan PPh 25 Badan pada PT. BELAPUTERA INTERPLAN.**

1.2. Tinjauan Kerja Praktek

Untuk mengetahui prosedur pelaporan PPH 25 badan pada PT. BELAPUTERA INTERPLAN (***Engineering Consultant***).

1.3. Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan pembuatan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

- Bagi penulis, agar dapat mengetahui lebih mendalam tentang prosedur pelaporan PPh pasal 25 badan.
- Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dengan sistem pemungutan pajak penghasilan pasal 25 yang digunakan selama ini dengan meningkatkan penerimaan negara.
- Bagi pihak lain, sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor pelayanan Pajak di daerah lain agar mampu meningkatkan dan memperbaiki sistem dan prosedur penerimaan yang telah ada.

1.4. Metode Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja praktek ini penulis menggunakan metode blok realeasse style, yaitu metode dilaksanakannya kerja praktek satu bulan penuh kecuali hari sabtu dan minggu, yang berusaha memperoleh informasi tentang

gambaran keadaan saat sekarang dalam menghimpun data serta menerapkan data tersebut guna memecahkan masalah.

1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan di PT. BELAPUTERA INTERPLAN yang beralamat di Jalan Wayang No.34 Bandung.

Adapun waktu dan lamanya pelaksanaan selama 1 bulan terhitung dari tanggal 02 September sampai dengan tanggal 07 Oktober 2002.

Waktu pelaksanaan kerja praktek dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap hari dari hari senin sampai juma'at mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00.
2. Hari sabtu libur.